

## LAMPIRAN :

## TINDAK LANJUT HASIL DESK EVALUATION CALON SATUAN KERJA WBK/WBBM TAHUN 2020

SATKER : BPS KABUPATEN PASANG KAYU

PENILAI : 1. SULISTYOWATI (DALNIS)

2. ARIF SANTOSO (KETUA TIM)

3. ADITYA YUNianto (ANGGOTA TIM)

KRITERIA PENILAIAN			DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
A.	PROSES (60)			
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)			
	1	Tim Kerja (1)		
		a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	-	-
		b. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Untuk memperkuat bukti dukung dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa kertas kerja pemilihan tim atau SOP pemilihan tim.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi SOP Penyelenggaraan Rapat Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas.
	2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)		
		a. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Telah terdapat rencana kerja, namun masih berbentuk sederhana berupa tabel. Agar dibuatkan dalam bentuk laporan resmi yang didalamnya terdapat pendahuluan, isi dan penutup.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas dalam bentuk laporan.
		b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	-	-
		c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Untuk memperkuat bukti dukung agar dilengkapi gambar/bukti dokumentasi media sosialisasi (facebook, twitter, instagram) atau website terkait pembangunan WBK/WBBM di BPS Kabupaten Pasangkayu kepada publik yang lebih luas.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti dokumentasi media sosialisasi (facebook, twitter, instagram) atau website terkait pembangunan WBK/WBBM di BPS Kabupaten Pasangkayu kepada publik yang lebih luas.
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)		
		a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebaiknya dikemas dalam bentuk laporan, tidak hanya dalam bentuk tabel saja. Selain laporan, dapat dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan rencana aksi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
		b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Monitoring dan evaluasi belum mencerminkan progress kegiatan dan monitoring terperinci aktivitas yang dilakukan sesuai rencana kegiatan pembangunan. Laporan monitoring dan evaluasi agar lebih diperinci kembali. Untuk memperkuat penilaian dapat menambahkan Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.
		c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Untuk memperkuat bukti dukung agar menambahkan dokumen bukti atau laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan WBK/WBBM, seperti undangan dan notulensi rapat atau dokumentasi kegiatan lainnya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa undangan dan notulensi rapat tindak lanjut atau dokumentasi kegiatan pelaksanaan tindak lanjut lainnya.
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)		
		a. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Untuk memperkuat bukti dapat menambahkan keterlibatan nyata pimpinan, seperti rapat pembahasan, kehadiran pimpinan saat kegiatan pembangunan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa rapat pembahasan, kehadiran pimpinan saat kegiatan pembangunan.
		b. Sudah ditetapkan agen perubahan	Belum terdapat bukti agen perubahan ( <i>change agen</i> ) telah ditetapkan, bukti dukung yang dilampirkan berupa SK Tim Kerja ZI dan SK Penetapan Pegawai Teladan Ter-PIA kurang relevan. Bukti dukung penilaian dapat berupa : (i) SK Agen Perubahan yang memuat uraian Tugas dan Fungsi agen perubahan. (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat pembentukan agen perubahan.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi SK Agen Perubahan.
		c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Belum ada bukti yang dilampirkan untuk pelatihan budaya kerja dan pola pikir. Bukti dukung dapat berupa: (i) Capacity Building, Sosialisasi atau rapat. (ii) Laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja (mis. program reward & punishment); (iii) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan; (iv) Absensi pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa: (i) Capacity Building, Sosialisasi atau rapat. (ii) Laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja (mis. program reward & punishment); (iii) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan; (iv) Absensi pegawai.
		d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Perlu ditambahkan bukti keterlibatan seluruh anggota seperti daftar hadir rapat, dokumentasi kegiatan, SK Tim ZI yang memuat seluruh pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa daftar hadir rapat pembangunan ZI, dokumentasi kegiatan.

II.	PENATAAN TATALAKSANA (5)				
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)			
		a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	SOP belum disahkan oleh Kepala Unit Kerja, masih dalam bentuk word. Dalam SOP belum terlihat inovasi yang dilakukan oleh unit kerja.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi dengan SOP yang sudah disahkan oleh Kepala Unit Kerja. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa SOP Inovasi unit kerja.
		b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Agar menambahkan bukti pendukung yang menggambarkan pelaksanaan SOP. Bukti dukung dapat berupa : (i) Memorandum pelaksanaan tugas sesuai SOP pada tiap penugasan. (ii) Laporan kegiatan-kegiatan dicantumkan bahwa pelaksanaan sesuai SOP. (iii) Bukti rapat evaluasi suatu kegiatan sekaligus membahas penerapan SOP-nya (disebut dalam notulen). (iv) Bukti dukung yang disebutkan dalam SOP terkait.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi dokumen penerapan SOP. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi pada SOP yang diterapkan.
		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Belum ada dokumen evaluasi ataupun tindak lanjut atas hasil evaluasi SOP. Bukti dukung dapat berupa: (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi atas SOP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen. (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat, misal progres perbaikan SOP. (iii) Laporan evaluasi pelaksanaan SOP, dapat dibuat secara periodik sebagai hasil pelaksanaan rapat evaluasi SOP. (iv) Dokumen SOP awal dan SOP perbaikan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu : (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi atas SOP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen. (ii) Dokumen SOP awal dan SOP perbaikan
	2	E-Office (2)			
		a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Untuk memperkuat bukti penilaian dapat menambahkan capture penggunaan SiMonev BPS. Namun belum ada inovasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk sistem pengukuran kinerja unit.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi penggunaan teknologi informasi untuk sistem pengukuran kinerja unit.
		b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Agar menambahkan bukti inovasi dalam penggunaan teknologi informasi operasionalisasi manajemen SDM.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi penggunaan teknologi informasi operasionalisasi manajemen SDM.
		c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Belum ada inovasi dalam penggunaan teknologi informasi, agar ditambahkan bukti terkait inovasi.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti inovasi pelayanan kepada publik dengan whatsapp, youtube, facebook dan instagram.
		d.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan TI untuk mendukung operasional, bukti dukung berupa laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI kurang relevan. Bukti dukung dapat berupa : (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi penggunaan TI, misalnya undangan, daftar hadir, notulen. (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan TI. (iii) Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI, dapat dibuat secara periodik.	Belum semua pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan secara bulanan. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan monitoring dan evaluasi bulanan untuk semua teknologi informasi.
	3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)			
		a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Perlu ditambahkan bukti dokumen pendukung tentang penerapan keterbukaan informasi publik, seperti surat yang menjelaskan penerapan KIP, SK, atau Surat Tugas. Kebijakan Informasi Publik (KIP) memuat minimal: - apa saja yang perlu diketahui masyarakat, baik berupa produk BPS atau transparansi pelaksanaan pemerintahan. - kapan hal-hal di atas di-update dan siapa yang berwenang. - hal terkait pengaduan apabila ada keluhan dalam akses informasi.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti penerapan keterbukaan informasi publik.
		b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi khusus atas penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, bukti dukung berupa laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI kurang relevan. Bukti dukung dapat berupa : (i) Bukti rapat evaluasi pelaksanaan KIP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen. (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan yang dilakukan. (iii) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIP, dapat dibuat secara periodik.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIP. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu : (i) Bukti rapat evaluasi pelaksanaan KIP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen. (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan yang dilakukan

III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)				
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)			
		a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Agar ditambahkan dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja Satker.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja.
		b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Belum terdapat bukti pendukung penempatan pegawai berdasarkan dokumen peta jabatan atau analisis kebutuhan pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen analisis kebutuhan pegawai.
		c.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan pegawai, bukti dukung berupa laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI kurang relevan. Bukti dukung dapat berupa : (i) Laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai (dievaluasi juga peningkatan kinerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi; (iii) Dokumen money kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit.	Bukti dukung money penempatan 3 (tiga) pegawai telah ada namun peletakkannya salah pada folder 3.1.2.
	2	Pola Mutasi Internal (2)			
		a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Untuk memperkuat bukti, dapat ditambahkan : (i) Undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan rapat mutasi internal (bukti dukung yang dilampirkan pada poin b). (ii) Riwayat pendidikan/diklat/pengembangan karir lainnya untuk pegawai yang dimutasi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen pola dasar mutasi.
		b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Perlu tambahan bukti bahwa mutasi berdasarkan analisis kompetensi jabatan dan pola mutasi yang diterapkan, misal kebutuhan pegawai pada subbagian atau seksi tertentu.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu analisis kebutuhan pegawai pada subbagian atau seksi.
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi atas mutasi pegawai dan dampaknya pada perbaikan kinerja, bukti dukung berupa laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI kurang relevan. Bukti dukung dapat berupa : (i) Laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai(dievaluasi juga peningkatan kinerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi pegawai yang dimutasi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu: (i) Laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai(dievaluasi juga peningkatan kinerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi pegawai yang dimutasi.
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)			
		a.	Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Telah ada rapat namun belum menghasilkan dokumen training need analysis satker.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa lapaoran training need analysis.
		b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Belum ada dokumen rencana pengembangan kompetensi dan kaitannya dengan kinerja pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen rencana pengembangan kompetensi dan kaitannya dengan kinerja pegawai.
		c.	Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Belum terdapat bukti dukung yang dilampirkan, bukti berupa dokumen analisis kesenjangan standar kompetensi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa analisis kesenjangan standar kompetensi.
		d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Perlu ditambahkan bukti rencana pengembangan kompetensi pegawai sehingga terlihat kesempatan untuk seluruh pegawai terutama pengembangan kompetensi. Bukti dukung dapat juga berupa undangan diklat/pelatihan yang lain dan usulan pengajuannya (pada tahun yang relevan), yang menunjukkan kesempatan untuk seluruh pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu : (i) bukti rencana pengembangan kompetensi pegawai sehingga terlihat kesempatan untuk seluruh pegawai. (ii) undangan diklat/pelatihan dan usulan pengajuannya (pada tahun yang relevan), yang menunjukkan kesempatan untuk seluruh pegawai.
		e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)	Disamping dokumentasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, perlu ditambahkan dokumen pendukung seperti undangan, daftar hadir, laporan pelaksanaan, dsb. Sehingga terlihat keterlibatan seluruh pegawai.	Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan BPS kabupaten lain. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen undangan, daftar hadir, laporan pelaksanaan, dsb. Sehingga terlihat keterlibatan seluruh pegawai.
		f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan pegawai, bukti dukung berupa laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI kurang relevan. Bukti dukung dapat berupa : (i) Laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai (dievaluasi juga peningkatan kinerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu : (i) Laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai (dievaluasi juga peningkatan kinerjanya) secara bulanan; (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi pengembangan kompetensi.

			<b>4 Penetapan kinerja individu (4)</b>		
			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Belum ada dokumen penetapan kinerja individu, bukti dukung berupa matrik kegiatan pegawai kurang relevan. Bukti dukung dapat berupa : (i) SKP pegawai yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya (ii) IKI (Indikator Kinerja Individu) (iii) PK yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan (iv) RENSTRA.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu : (i) SKP pegawai yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya (ii) IKI (Indikator Kinerja Individu)
			b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Belum ada dokumen penetapan kinerja individu/ IKI (Indikator Kinerja Individu). Dokumen SKP perlu dilengkapi untuk masing-masing individu didalam PK sehingga terlihat kinerja telah sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu : (i) IKI (ii) SKP pegawai secara berjenjang sehingga terlihat kesesuaian dengan indikator kinerja level diatasnya.
			c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Dokumen CKP agar disahkan/ditandatangani, sehingga menjadi bukti dukung yang valid. Serta ditambahkan laporan/rekap pengukuran kinerja setiap level per bulan.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti dokumen pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan.
			d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	Bukti pemberian reward harap dilengkapi dengan dokumen seleksi, seperti kriteria penilaian, dan mekanismenya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen penilaian, seperti kriteria penilaian, dan mekanismenya.
			<b>5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)</b>		
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Perlu ditambahkan dokumen bukti penerapan disiplin pegawai seperti monitoring atas pemberian hukuman disiplin pegawai. Selain itu juga perlu menambahkan bukti adanya inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti penerapan disiplin pegawai seperti monitoring atas pemberian hukuman disiplin pegawai. Serta bukti adanya inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
			<b>6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)</b>		
			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	Bukti capture SIMPEG belum menunjukkan adanya pemutakhiran secara bulanan. Perlu ditambahkan bukti pemutakhiran data kepegawaian bulanan dalam bentuk monitoring dan implementasinya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti pemutakhiran data kepegawaian bulanan dalam bentuk monitoring dan implementasinya.
			<b>IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)</b>		
			<b>1 Keterlibatan pimpinan (5)</b>		
			a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Undangan Rapat Reviu Dokumen Perencanaan, Penetapan Kinerja dan Matriks Kegiatan agar ditandatangani dan tambahkan bukti daftar hadir.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan perencanaan kegiatan dan anggaran yang disahkan pimpinan.
			b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Undangan Rapat Reviu Dokumen Perencanaan, Penetapan Kinerja dan Matriks Kegiatan agar ditandatangani dan tambahkan bukti daftar hadir.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti keterlibatan pimpinan.
			c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Perlu ditambahkan dokumen monitoring atas pencapaian kinerja pegawai.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah menambahkan bukti monitoring evaluasi.
			<b>2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)</b>		
			a. Dokumen perencanaan sudah ada	Agar menambahkan bukti dukung berupa rencana kerja tahunan. Bukti dukung sebaiknya dilampirkan, tidak hanya capture website.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa screen shot Aplikasi KRISNA (Pengganti bukti rencana kerja tahunan).
			b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Agar menambahkan bukti dukung berupa rencana kerja tahunan yang berorientasi pada hasil.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa screen shot Aplikasi KRISNA (Pengganti bukti rencana kerja tahunan).
			c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Belum terdapat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Untuk perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
			d. Indikator kinerja telah SMART	-	-
			e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	-	-
			f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	-	-
			g. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Foto dokumentasi kegiatan agar dibuat dalam format laporan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Laporan tersebut harus bisa menggambarkan peningkatan untuk seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan penyelenggaraan bimtek/pelatihan/sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
			h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Belum ada dokumen kompetensi pegawai yang mengelola akuntabilitas kinerja, seperti SK ataupun bukti kompetensi pegawai lainnya. Sertakan data pegawai yang mengelola akuntabilitas pekerja beserta dengan kompetensinya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu: (i) Data pegawai yang mengelola akuntabilitas kinerja (ii) Bukti kompetensi pegawai tsb. di atas, misal sertifikat, piagam, dalam bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja.

V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)				
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)			
		a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Perlu dokumentasi tambahan public campaign pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkala.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen sosialisasi larangan gratifikasi dalam rapat internal maupun eksternal (undangan, notulen, daftar hadir).
		b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Agar menambahkan bukti adanya inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
	2	Penerapan SPIP (3)			
		a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Belum ada dokumen terkait implementasi SPIP seperti dokumen sosialisasi SPIP dan laporan kegiatan yang terkait SPIP.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen sosialisasi SPIP dan laporan kegiatan yang terkait SPIP.
		b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Belum ada dokumen bukti penilaian risiko yang dilakukan sater. Bukti dukung berupa dokumen peta resiko atau matrik identifikasi resiko beserta penilaian risikonya.	Screenshot aplikasi E-SPIP tidak bisa dilakukan oleh sater karena web tidak dapat diakses. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen peta resiko atau matrik identifikasi resiko beserta penilaian risikonya.
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Belum ada bukti pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko. Bukti dukung berupa dokumen laporan pengendalian yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.	Screenshot aplikasi E-SPIP tidak bisa dilakukan oleh sater karena web tidak dapat diakses. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen laporan pengendalian yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
		d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Belum ada dokumen pendukung komunikasi/sosialisasi SPI terhadap pihak terkait, seperti undangan, daftar hadir, notulen pertemuan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen sosialisasi SPI terhadap pihak terkait, seperti undangan, daftar hadir, notulen pertemuan.
	3	Pengaduan Masyarakat (3)			
		a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Agar menambahkan bukti inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
		b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Belum ada laporan atas pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti. Bukti dukung yang dilampirkan berupa tabel monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas kurang relevan.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi khusus untuk pengaduan masyarakat.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara bulanan.
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Belum ada laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
	4	Whistle-Blowing System (3)			
		a.	<i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi	Perlu ditambahkan bukti internalisasi di unit kerja. Dokumen dan capture internalisasi Whistle Blowing System (WBS) dapat berupa: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto) - bimtek (laporan, foto) - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan)	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti internalisasi : - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto) - bimtek (laporan, foto) - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan)
		b.	<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Belum terdapat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Belum terdapat bukti laporan monitoring dan evaluasi khusus atas whistle blowing system baik triwulan/bulanan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan monev atas penerapan WBS secara bulanan.
		d.	Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Belum terdapat bukti laporan tindak lanjut hasil evaluasi khusus atas whistle blowing system.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi bulanan di atas.

			<b>5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)</b>		
			a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Belum ada bukti identifikasi atas benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Bukti dukung dapat berupa : (i) Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. (ii) Perka BPS tentang penanganan benturan kepentingan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu: (i) Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. (ii) Perka BPS tentang penanganan benturan kepentingan.
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Belum ada bukti internalisasi penanganan benturan kepentingan. Bukti dukung dapat berupa : Dokumen dan capture internalisasi penanganan benturan kepentingan, antara lain: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto). - bimtek (laporan, foto). - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan).	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu, sosialisasi benturan kepentingan berupa: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto). - bimtek (laporan, foto). - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan).
			c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Belum ada bukti implementasi atas penanganan benturan kepentingan. Bukti dukung dapat berupa: (i) SK Tim/unit yang menangani Penanganan Benturan Kepentingan. (ii) Kebijakan pimpinan terkait Penanganan Benturan Kepentingan. (iii) Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu: (i) SK Tim/unit yang menangani Penanganan Benturan Kepentingan. (ii) Kebijakan pimpinan terkait Penanganan Benturan Kepentingan. (iii) Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
			d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Belum ada monitoring khusus penanganan benturan kepentingan secara berkala. Bukti dukung berupa laporan move at atas penanganan benturan kepentingan secara berkala.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala.
			e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Belum ada laporan tindak lanjut atas monitoring khusus penanganan benturan kepentingan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa laporan tindak lanjut atas monitoring khusus penanganan benturan kepentingan.
			<b>VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)</b>		
			<b>1 Standar Pelayanan (3)</b>		
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Belum terdapat bukti inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Belum terdapat bukti inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
			c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP Pelayanan Statistik Terpadu agar disahkan/ditandatangani. Serta belum terdapat bukti inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
			d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Belum ada dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan inisiatif dari unit kerja.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Pasangkayu berupa bukti unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
			<b>2 Budaya Pelayanan Prima (3)</b>		
			a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Belum ada dokumen pelaksanaan sosialisasi/pelatihan untuk peningkatan pelayanan prima. Bukti dukung dapat berupa : - rapat (undangan, daftar hadir, notulen). - sosialisasi/pelatihan/bimtek (laporan dan materi).	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi dokumen sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima.
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	-	-
			c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Belum ada bukti pemberian sanksi/reward berdasarkan pelayanan. Bukti dukung dapat berupa : (i) Dokumen sistem reward and punishment. (ii) Dokumen penghargaan atas pelaksanaan pelayanan yang baik dan punishment untuk sebaliknya. (iii) Dokumen kompensasi kepada penerima layanan.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti adanya reward/punishment bagi pelaksana layanan.
			d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	-	-
			e. Terdapat inovasi pelayanan	Perlu ditambahkan laporan pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan pada unit kerja.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi bukti inovasi berupa BPS goes to school, dan pelayanan melalui WA, facebook, instagram serta youtube.
			<b>3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)</b>		
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	-	-
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Agar ditambahkan akses hasil survei kepuasan masyarakat melalui media sosial (Facebook, twitter, youtube, instagram dll).	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Agar dibuatkan laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari seluruh hasil survei kepuasan masyarakat.	BPS Kabupaten Pasangkayu telah melengkapi laporan tindak lanjut,